ABSTRAK

MOHAMMAD HIRZZI GHIFARI: *Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Pada Kasus Korupsi Dana Desa Citemu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus seorang *whistleblower* yang mengungkap tindak pidana korupsi justru berujung dijadikan tersangka. Namun sejatinya dalam peraturan yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 10 menyebutkan pada intinya bahwa seorang saksi, pelapor, (*whistleblower*) tidak dapat diuntut atas keterangan yang diberikannya baik secara perdata maupun pidana.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian untuk menganalisis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya pendekatan GONE Theory oleh Jack Bologne. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *whistleblower* belum secara maksimal dilakukan, dengan adanya kendala yaitu pertama kendala regulasi yang tidak spesifik di mana aturan yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan bagi *whistleblower*, kedua kendala aparat penegak hukum yang dalam praktiknya belum sepenuhnya memahami atau konsisten menerapkan prinsip perlindungan terhadap *whistleblower*, ketiga kendala kelembagaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, pertugas lapangan serta anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang di tangani di seluruh Indonesia. Adapun upaya dalam mengatasi kendala yaitu dengan upaya pembuatan regulasi khusus tentang *whistleblower* secara rinci dalam pembaharuan hukum pidana, upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap *whistleblower* pada aparat penegak hukum, serta upaya meningkatkan jaringan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Whistleblower*